

The Advance of Regionalism Theory: Regional Cooperation in the Context of Old and New Regionalism Comparison

(Calibri Light 14pt, bold, max 12 words)

Perkembangan Teorisi Regionalisme : Kerjasama Regional Dalam Konteks Komparasi Regionalisme Lama dan Baru

Yusnarida Eka Nizmi

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Riau, Indonesia

eka.nizmi@lecturer.unri.ac.id

Abstract

This research explores how regionalism theories explain regional cooperation and integration become essential elements in the changing of regionalism model. These theories clearly conceptualized that regionalism was driven by decision making process independently by regional actors as a response to various factors from in or beyond region. The end of Cold War dan the rising of globalization were the ultimate factors of the existing of new regionalism theory that sooner become comparison element in discourses between old and new regionalism. This research early statement was regional cooperation and regionalism former theories have bias by imposing state as the main driven of regionalism and focus on formal institutional establishment process in regional level. This research implies regionalism theory both old and new regionalism in comparing the advance of these theories. Qualitative method applies in this research. The data was collected by doing interview and collecting information from journals, books, and reports. This research shows that globalization ensures states to do regional cooperations which outward looking oriented or embedded export, short period in making working papers and has complementary among states. This kind of regional cooperation was named by Growth Triangle (GT). Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) was become part of new regionalism model that was analyzed in this research.

Keywords: Regionalism, Old Regionalism, New Regionalism, Regional Cooperation, IMT-GT

Abstrak

Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana teori-teori regionalisme menjelaskan kerjasama dan integrasi regional yang menjadi dasar perubahan dalam model regionalisme. Teori-teori ini secara eksplisit mengkonsepkan regionalisme sebagai sesuatu yang digerakkan oleh pembuatan keputusan yang independen dari aktor-aktor regional sebagai respon terhadap faktor-faktor penyebab yang berasal dalam maupun luar kawasan. Berakhirnya Dingin dan kemunculan globalisasi menjadi faktor penentu dari hadirnya teori regionalism baru yang menjadi elemen pembanding dalam diskursus komparasi antara regionalisme lama dan regionalisme baru. Tulisan ini mengawalinya dengan berpendapat bahwa teori-teori awal dari kerjasama regional dan integrasi memiliki bias dengan menempatkan negara sebagai penggerak utama dari regionalisme dan memfokuskan pada proses-proses pembentukan institusi formal pada level regional. Tulisan ini menerapkan kerangka pemikiran dari teori regionalisme baik regionalisme lama maupun regionalisme baru yang menjadi dasar acuan dalam membandingkan perkembangan teori regionalisme ini. Metode kualitatif menjadi pilihan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sekaligus wawancara dengan mengumpulkan data dan dokumen dari jurnal, buku, dokumen rapat, serta bertanya langsung kepada informan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi memudahkan banyak negara melakukan kerja sama regional yang berorientasi pada ekspor, tidak memakan waktu lama dalam pembuatan kesepakatan perjanjian kerja sama, dan memiliki komplementaritas yang saling menguntungkan yang dikenal dengan Growth Triangle (GT). Indonesia Malaysia Thailand- Growth Triangle (IMT-GT) menjadi bagian dari regionalisme baru yang dipaparkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Regionalisme, Regionalisme Lama, Regionalisme Baru, Kerja Sama Regional, IMT-GT

Pendahuluan

Kajian mengenai regionalisme terbagi atas dua penjelasan yang berbeda. Teori-teori hubungan internasional menempatkan regionalisme sebagai sebuah percepatan untuk membentuk kerjasama internasional (Haas 1975). Perkembangan dari studi-studi mengenai Uni Eropa menjadi sub-disiplin hubungan internasional yang memiliki dampak signifikan bagi riset-riset mengenai regionalisme. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu pertama, kerja sama dan integrasi menjadi dua hal yang berbeda dari regionalisme. Kerjasama regional mengandung makna implementasi gabungan dari negara-negara yang bergabung dalam ikatan kerja sama berdasarkan otoritas politik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bersama yang berhubungan dengan ekonomi, politik, atau isu-isu keamanan. Integrasi regional, sebaliknya, melibatkan pembentukan institusi-institusi supranasional dimana otoritas politik di delegasikan untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat, misalnya penghapusan batasan-batasan nasional untuk pertukaran ekonomi dan sosial seperti pembuatan pasar bersama yang ditujukan untuk membendung pengaruh negatif dari liberalisasi (Scharpf 1996) atau pun mengatasi kehadiran konflik-konflik internasional (Adler dan Barnett 1998).

Kedua, teori-teori integrasi utamanya mengkaji kemunculan dari integrasi Eropa. Upaya-upaya pembentukan teori integrasi memang tidak hanya terbatas pada kajian kawasan Eropa saja (Mitrany 1994; Hoffmann 1982; Haas 1975; Schmitter 2004), namun teori-teori integrasi tersebut juga mencoba untuk mengakomodasi dinamika yang muncul dari terjadinya proses integrasi Eropa dan hasil supranasionalnya. Integrasi Eropa menjadi tolak ukur dalam mengukur integrasi regional di belahan bumi yang lain. Sebagai konsekwensinya, teori-teori integrasi menerapkan regionalisme Uni Eropa, sementara teori-teori kerjasama memfokuskan pada pembahasan regionalisme di luar Eropa.

Studi-studi mengenai pembentukan dan pembangunan kawasan pada awal perkembangannya hanya mengadopsi sebuah perspektif yang berfokus pada negara sebagai aktor utamanya. Kehadiran pendekatan regionalisme baru mengkritisi regionalisme lama yang terlalu mengagungkan negara sebagai aktor utamanya. Pendekatan ini muncul di Eropa Barat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pemetaan kajian regionalisme lama masih berbasis pada pembahasan mengenai pembangunan institusi antar negara dalam kawasan, dan level trans-regional (Breslin et al. 2002; 2005; Laursen 2003; Schulz et al. 2001; Warleigh-Lack et al. 2006).

Regionalisme baru menekankan pada konstruksi sosial, peran pasar dan aktor-aktor sipil, juga memperhitungkan pentingnya menganalisis arus modal, perdagangan dan orang. Varietas-varietas baru dari regionalisme dibahas dengan lebih komprehensif dimana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor, namun hanya berperan sebagai “ penjaga dan pemberi fasilitas (Fawcett 2005: 24). Sebuah pemahaman baru dalam konteks regionalisme baru meyakini bahwa aktor-aktor negara memang penting namun sekumpulan aktor yang lain justru menjadi kunci dari pendekatan-pendekatan baru juga patut diperhitungkan. Pergeseran dari pendekatan yang berbasis pada negara kepada aktor di luar negara adalah karakteristik yang membedakan pendekatan regionalisme baru dengan regionalisme lama. Penekanan aktor yang berbeda menjadi tendensi dari teorisasi gelombang kedua untuk fokus pada beragam aktor publik maupun privat.

Regionalisme baru juga memiliki kecenderungan untuk menganalisa lebih mendalam kehadiran mikro-regionalisme transperbatasan dimana proses-proses yang berbeda dari regionalisasi pada level interaksi terjadi dalam pembentukan sebuah kawasan. Kekuatan-kekuatan ekonomi, politik dan sosial hadir bersamaan dan membentuk serangkaian norma, prinsip, dan identitas baru yang kolektif pada level regional baik secara makro maupun mikro. Pada akhirnya, dapat ditegaskan bahwa regionalisasi baru atau mikro regionalisme adalah serangkaian proses yang terjadinya lebih spontan dan alami dengan melibatkan elemen negara, pasar, dan aktor-aktor masyarakat sipil yang diorganisir dalam jejaring formal dan informal (Söderbaum 2005; Jessop 2003).

Tulisan ini akan memaparkan mengenai perkembangan pendekatan teori regionalism yakni regionalisme lama dan regionalismee baru. Regionalisme baru yang di dukung oleh kehadiran globalisasi sekaligus menjadi pembanding bagi regionalisme lama menjadikan diskursus yang berkaitan dengan kawasan menjadi menarik untuk di analisis. Periode akhir 1980an menjadi saksi bagi kebangkitan regionalisme di seluruh dunia dalam membentuk regional baru. Fakta penting yang signifikan adalah adanya perubahan geopolitik dengan berakhirnya perang dingin dan meningkatnya proses globalisasi. Regionalisme dan regionalisasi menjadi lebih kompleks dan muncul sejumlah kesepakatan-kesepakatan regional dalam belakangan tahun terakhir. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan kemunculan dalam aktivitas regional ini. Richard Higgot (2006) meyakini bahwa promosi dari strategi-strategi pertumbuhan merupakan perkembangan dari meningkatnya regionalisasi ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik kepustakaan (*library research*) dan juga wawancara. Teknik kepustakaan digunakan karena banyak informasi dan data tentang pergeseran regionalisme lama ke regionalisme baru. dapat ditelusuri dalam buku-buku, jurnal-jurnal

ilmiah, surat-surat kabar, majalah-majalah, dan sumber-sumber dari *website* yang dapat diakses melalui internet. Teknik ini ditujukan untuk memperoleh data secara keseluruhan mengenai informasi yang diperlukan terkait dengan topik yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi penting demi menyempurnakan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dan Diskusi

Mengenal Ragam Pendekatan Dalam Regionalisme

Ada beberapa pendekatan yang dapat dijadikan panduan dalam membahas isu regionalisme. *Pertama*, kelompok rasionalis yang berbasis pada negara sebagai aktor utama, dengan asumsi bahwa kerjasama adalah sesuatu yang penuh resiko. Pendekatan yang berbasis power ini mengidentifikasi distribusi power internasional dan regional sebagai sebuah penggerak yang penting dari kemunculan regionalisme. Pendekatan Kelompok ini terletak pada konteks kerjasama dan integrasi yang menempatkan regionalisme sebagai sebuah respon strategis dari negara dan aktor-aktor ekonomi untuk menghadapi tantangan globalisasi dimana kunci penggerakannya adalah interdependensi ekonomi.

Kedua, Kelompok fungsionalis yang menjelaskan tingginya tingkat interdependensi ekonomi sebagai syarat penguatan institusi-institusi regional untuk menangani konflik (Milner 1997; Moravcsik 1999;), ketidakpastian, dan persoalan-persoalan yang ada. Pendekatan klasik seperti Pendekatan rasionalis fungsionalis secara khusus menawarkan argumen yang kuat mengenai mengapa negara terikat dalam pembentukan institusi regional pada pembahasan yang utama.

Ketiga, Kelompok Neoliberal institutionalisme yang berbasis pada negara, meyakini bahwa anarki internasional mengharuskan adanya interdependensi kompleks antar negara dan berbagi kepentingan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul dengan membentuk institusi-institusi internasional (Keohane 1984; Martin dan Simmons 1998), yang intensif pada level regional. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa globalisasi adalah penggerak eksternal yang utama bagi pembentukan regionalisme. Pasar-pasar global meningkatkan arus mobilitas lintas batas dan perluasan interaksi ekonomi (Schirm 2002; Breslin et al. 2002). Pendekatan ini menawarkan argumen yang kuat mengenai mengapa negara terikat dalam pembentukan institusi regional pada pembahasan yang utama. Globalisasi, interdependensi ekonomi dan keamanan non tradisional diantara negara-negara tetangga menciptakan adanya tuntutan yang kuat untuk terciptanya sebuah regionalisme.

Keempat, pendekatan lain yang juga mencoba berbicara mengenai regionalisme adalah Pendekatan Konstruktivis. Pendekatan Konstruktivis memandang bahwa kerjasama dan integrasi sedikit sekali mendapat porsi perhatian dalam literatur-literatur yang ada. Pendekatan ini menempatkan ide, norma, identitas dan wacana-wacana sebagai penggerak regionalisme. (Wendt, 1999).

Kelima, Karl Deutsch juga menyumbang pemikiran dalam isu regionalisme yang dikenal dengan Pendekatan Transaksionalisme. Pendekatan ini berpendapat bahwa kesuksesan integrasi mensyaratkan adanya perasaan yang sama dalam komunitas (Deutsch et al. 1957; Acharya 2006). Kelompok Transaksionalis yang dikembangkan oleh Karl Deutsch pada tahun 1950an (Deutsch et al. 1957) menegaskan bahwa bahwa kekuatan militer tidak lagi menjadi alat utama untuk menyelesaikan konflik karena negara-negara secara formal akan saling bergantung dalam komunitas keamanan yang pluralistik. Jika negara terikat dalam sebuah aliansi, maka negara akan berbagi struktur, norma dan nilai-nilai yang penting bagi identitas regional untuk memfasilitasi munculnya rasa saling percaya dan kemampuan mengatasi konflik bersenjata (Adler dan Barnett 1998; Archarya 2001). Namun, masih belum jelas apakah berbagi norma dan nilai adalah sebuah prakondisi atau menjadi sebuah indikator bagi integrasi regional.

Akhir Perang Dingin dan Kemunculan Regionalisme Baru

Periode akhir 1980an menjadi saksi bagi kebangkitan regionalisme di seluruh dunia dalam membentuk regional baru. Fakta penting yang signifikan adalah adanya perubahan geopolitik dengan berakhirnya perang dingin dan meningkatnya proses globalisasi. Regionalisme dan regionalisasi menjadi lebih kompleks dan muncul sejumlah kesepakatan-kesepakatan regional dalam belakangan tahun terakhir. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan kemunculan dalam aktivitas regional ini. Richard Higgot (2006) meyakini bahwa promosi dari strategi-strategi pertumbuhan merupakan perkembangan dari meningkatnya regionalisasi ekonomi.

Proses-proses regionalisasi yang dipengaruhi oleh globalisasi antara tahun 1980an dan 1997 terjadi ketika krisis Asia berkontribusi terhadap adanya kecenderungan untuk bergerak menuju antara globalisasi dan regionalisasi di Asia Timur. Konteks awalnya adalah berakhirnya Perang Dingin. Keadaan selanjutnya bertransformasi secara radikal dan turut mempengaruhi negara-negara dan blok-blok regional secara berbeda-beda sebagaimana mereka merancang ulang aliansi regional dan global. Pada pertengahan 1980an, European Communities (EC) memperluas dan memperdalamnya untuk menjadi Uni Eropa. Runtuhnya blok Soviet, membuka peluang besar

bagi negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur untuk bergabung dengan Uni Eropa dan memunculkan ketakutan di Asia mengenai masa depan ekonomi di Kawasan ini.

Sebuah fokus baru dari teori hubungan internasional telah muncul, yang berbeda dari studi fenomena Eropa. Hal ini membuktikan bahwa regionalisme baru adalah suatu proses yang mengandung beragam bentuk dari proses regionalisme dan struktur-struktur institusional. Apa yang membedakan regionalisme baru dari regionalisme lama adalah fokus analisis mereka pada beragam aktor, termasuk aktor-aktor publik dan privat. Baik proses institusionalisasi maupun yang non-institusionalisasi dipandang sebagai regionalisme makro dan mikro atau apa yang disebut Wallace (1992) dengan integrasi formal dan informal. Integrasi formal mengacu pada integrasi yang digerakkan oleh aktor-aktor pemerintah dan hasilnya adalah pembuatan keputusan politik yang secara sadar dilakukan dari level bawah. Integrasi informal biasanya digerakkan oleh dinamika-dinamika sosial, ekonomi dan politik dan mengacu pada penciptaan ruang-ruang transnasional melalui interaksi dari aktor-aktor privat.

Dalam konteks ini, peningkatan penerapan beragam kebijakan domestik yang neo-liberal dalam sebuah variabel penjelas bagi inisiatif-inisiatif regionalisme. Ini adalah satu cara dimana regionalisme baru datang menghampiri wilayah Selatan. Kebutuhan untuk merespon globalisasi atau berpartisipasi di dalam ekonomi global adalah faktor penggerak utama bagi pemerintah.

Globalisasi dan Regionalisme

Globalisasi adalah penggerak eksternal yang utama bagi pembentukan regionalisme. Pasar-pasar global meningkatkan mobilitas lintas batas dan perluasan interaksi ekonomi (Schirm 2002; Breslin et al. 2002). Globalisasi memiliki pengaruh dalam pembentukan institusional regional, dimana negara-negara merespon secara independen dan seringkali berbeda pula cara meresponnya. Ketika negara-negara maju hampir secara keseluruhan berupaya untuk membentuk globalisasi dan mengatur kekuatan-kekuatan eksternalnya dengan membangun insituti-institusi regional, negara-negara berkembang justru terlibat dalam regionalisme protektif mengurangi ketergantungan mereka pada pasar-pasar global dan kekuatan-kekuatan kolonial.

Dari akhir tahun 1980an ada sejumlah peningkatan minat dalam kajian-kajian yang berbasis pada globalisasi dan keterkaitannya dengan arus dan pembentukan berbagai integrasi dan kerja sama di kawasan. Diantara berbagai fakta yang melatarbelakanginya adalah: pertama, kemunculan kompetisi yang mengharuskan semua yang terikat pada bisnis untuk memperpendek waktu riset dan pengembangannya dan memilih riset kollaboratif lintas batas yang berbasis pada mitra-mitra kerja sama yang strategis. Kedua pergeseran paradigma dari *Fordism* kepada *post-fordism*, yang beranggapan bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi bergantung pada fleksibilitas dari produksi, pengetahuan dan intensitas kerja sama, harga sewa yang kompetitif, serta masa produksi yang lebih pendek (lihat Lipietz 1987 on Fordism; Ohmae 1993; Jessop 2004; Amin and Thrift 1994).

Ketiga, revolusi teknologi informasi, turut membantu terjadinya percepatan komunikasi dan kordinasi sebagai syarat utamanya, yang melibatkan percepatan arus informasi, orang, dan sumber daya yang lain (lihat Castells 1989). Keempat, dampak dari kembalinya neoliberal 1980an yang memperkenalkan deregulasi keuangan, liberalisasi dan peluang-peluang yang lebih besar bagi arus lintas batas, kerjasama dan aliansi-aliansi. Kelima, kemunculan korporasi-korporasi multinasional yang dianggap sebagai aktor utama dari globalisasi bagi percepatan mobilitas modal internasional.

Proses-proses regionalisasi yang dipengaruhi oleh globalisasi terjadi antara tahun 1980an dan 1997 ketika krisis Asia berkontribusi terhadap adanya kecenderunagn umum bergerak menuju antara globalisasi dan regionalisasi di Asia Timur. Konteks awalnya adalah berakhirnya Perang Dingin. Keadaan selanjutnya bertransformasi secara radikal dan turut mempengaruhi negara-negara dan blok-blok regional secara berbeda-beda sebagaimana mereka merancang ulang aliansi regional dan global. Pada pertengahan 1980an, European Communities (EC) memperluas dan memperdalamnya untuk menjadi Uni Eropa. Runtuhnya blok Soviet, memberi peluang bagi negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur akan segera bergabung dengann Uni Eropa dan memunculkan ketakutan di Asia mengenai masa depan ekonomi mereka.

Pola yang menarik untuk dianalisis dari keterkaitan antara globalisasi dan regionalisme ini adalah munculnya kerja sama regional yang semakin massif dan mengglobal. Kelompok pemikir regionalisme lama melihat pembentukan blok-blok kerja sama regional sebagai sebuah cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekonomi global yang lebih luas.

Pendekatan ini memaparkan globalisasi dan regionalisasi sebagai perbedaan atau tren-tren yang berlawanan. Beberapa pemikir regionalisme baru menawarkan sebuah geoekonomi untuk menggantikan pandangan geopolitikal yang dipandang sudah kurang relevan. Strategi-strategi regionalisasi tidak lagi berkitan dengan kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekonomi global namun diorientasikan untuk mempromosikan globalisasi dengan merangsang kompetisi sisi supply pada level regional. Dalam pendekatan ini, regionalisasi dan globalisasi seharusnya harus saling menguatkan (Oman 1994: 16).

Beberapa akademisi dalam studi hubungan internasional mencoba untuk memperluas diskursus mengenai keterkaitan globalisasi dan pembentukan regionalisme dengan mengidentifikasi beragam kriteria untuk memfasilitasi sebuah analisis komparatif dari regionalisme baru (Fawcett dan Hurrell 2005; Hettne 2005). Hurrell, membagi regionalisme pada lima kategori: regionalisasi, kepedulian dan identitas regional, kerja sama antar negara dalam satu kawasan, integrasi regional yang dipelopori oleh negara, serta kohesi regional.

Pendekatan Hurrell mengadopsi penekanan pada regionalisme baru sebagai sesuatu yang sudah didefinisikan di atas dibandingkan dengan pandangan dari Hettne, tokoh lain dari regionalisme baru. Lima usulan (ideal-typical) level regional yang terdiri dari "regional area, regional complex, regional society, regional community sampai "region state". Bagi Hettne, logika evolusioner ini, dibingkai dalam terminologi sebuah institusi yang digerakkan oleh keamanan dan pertumbuhan, yang memungkinkan untuk perkembangan komunitas kawasan. Hettne berasumsi bahwa pendekatan solidaritas berguna untuk menciptakan kerja sama regional dan keterkaitan kawasan demi menghindari dampak negatif dari globalisasi. Pendekatan ini memberikan cara yang menarik untuk memahami dan menganalisa regionalisme baru

Kerjasama regional dan integrasi mengalami peningkatan dan lebih berkembang tidak hanya karena adanya akses untuk pasar global dan menarik investasi asing langsung namun juga terbukti mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, industrial dan perlindungan sosial di kawasan.

Regionalisme Baru dan Growth Triangle

Salah satu teoritis dari pendekatan regionalisme baru yang sangat populer adalah Björn Hettne (1999; 2005), dimana Hettne mengidentifikasi lima ciri dari kawasan. Pertama, sebuah kawasan adalah sebuah unit geografikal. Kedua, kawasan adalah sebuah sistem sosial, yang memiliki hubungan translokal dan transnasional antara aktor dan agen yang berbeda. Hubungan-hubungan ini membentuk sebuah security complex dimana para aktor saling bergantung satu sama lain untuk keamanan mereka. Ketiga, kawasan dapat dicirikan melalui kerjasama yang terorganisir dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun militer. Dalam kasus ini, sebuah kawasan dapat diidentifikasi melalui anggota-anggota organisasi. Keempat, sebuah kawasan dapat menjadi sebuah komunitas masyarakat sipil ketika kerangka organisasional memfasilitasi dan mempromosikan komunikasi dan nilai-nilai sosial dalam kawasan. Dan kelima, kawasan dapat muncul secara kolektif ataupun melalui aktor-aktor internasional dengan identitas yang berbeda, kemampuan para aktor yang berbeda, dan tingkat tertentu dari legitimasi yang ada serta struktur pembuatan kebijakan.

Berkaitan dengan kehadiran regionalisme baru, harus dipahami bahwa globalisasi dan regionalisasi adalah tren-tren yang memang dominan dalam ekonomi dunia, menstimulasi integrasi ekonomi dan bentuk-bentuk baru dari kerjasama yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor. Konsep *growth triangle* (GT) adalah satu respon yang muncul terhadap tren-tren gerakan ini. Kerjasama Regional menjadi sebuah fenomena penting yang mengalami peningkatan dalam hubungan internasional selama enam puluh tahun terakhir. Sejak globalisasi yang menarik banyak perhatian para politisi, komunitas bisnis, akademisi dan publik secara umum, periode kontemporer secara mudah dapat dipandang sebagai "era regionalisme". Karena pada akhir 1980an, dunia menjadi saksi adanya sebuah kepentingan baru di dalam sebuah kemunculan integrasi regional (Wunderlich 2007).

Kehadiran sebuah GT mengeksplorasi kedekatan geografis dan komplementaritas sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara sebagai sebuah kawasan dengan kombinasi yang menarik (Bhaskaran, 2016). Perkembangan Growth Triangle digerakkan terutama oleh sektor privat, dimana pemerintah memfasilitasi arus perpindahan barang, jasa investasi, dan orang. Penamaan dengan GT menunjukkan adanya komplementaritas dari negara-negara yang bergabung dalam membangun kerjasama ekonomi subregional. Semakin besar perbedaan dalam *competitive advantage*, maka akan semakin sinergis GT jika mereka berkolaborasi secara efektif. Growth Triangle tumbuh karena adanya kebutuhan yang komplementer antar anggotanya. Berakhirnya Perang Dingin adalah sebuah kondisi penting untuk kelahiran GT. Hubungan komplementaritas dalam investasi, perdagangan dan sumber daya alam, dengan ragam perbedaan pertumbuhan, ragam jejaring dalam konteks transportasi dan ekonomi serta kedekatan budaya, termasuk juga konsensus politik dan komitmen antar wilayah GT adalah kunci suksesnya sebuah GT.

Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Sebagai Model Regionalisme Baru di Asia

Terminologi GT menjadi populer setelah Goh Chok Tong, Perdana Menteri Singapura, menggunakannya dalam "SIJORI GT". Goh Chok Tong, merancang pembentukan wilayah lintas batas (cross border region) Singapura-Johor-Riau/Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS) sebagai sebuah GT pada Desember 1989. Penamaan cross border region dengan "growth triangle" menunjukkan adanya komplementaritas dari kota-kota ini dalam membangun kerjasama ekonomi subregional.

Singapura dipandang sebagai sebuah balon yang terbang tinggi dalam konteks kerja sama IMS-GT dengan keterbatasan ketersediaan tanah dan tenaga kerja dan tingginya biaya produksi, Singapura terus mencari perluasan pemusatan manufaktur, perdagangan dan jasa bisnis, dan untuk memindahkan manufaktur yang berbasis tenaga kerja serta industri-industri pariwisata ke wilayah-wilayah sekitar Singapura dengan biaya yang rendah yakni Johor di Malaysia dan Riau di Indonesia. Komplementaritas lintas batas membuat Singapura mampu untuk melaksanakan orientasi ekspornya ke kota-kota baru di bawah sponsor publik yang juga dimotori oleh pemerintah berailiasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Ambisi Singapura untuk berkembang melalui IMS-GT meluas ke wilayah lain dari ASEAN. GT secara strategis diinterpretasikan sebagai sebuah investasi yang “outward oriented” yang mengharuskan adanya promosi atau pengembangan lebih lanjut.

Beberapa model GT banyak menjadi diskursus dalam Hubungan Internasional termasuk, *Indonesia Malaysia Growth Triangle* (IMT-GT). IMT-GT menjadi sebuah GT yang cukup populer di Kawasan Asia Tenggara sebagai bagian model Kerja sama Regionalisme Baru. Beberapa model GT yang penting tercatat antara lain South China GT, yang meliputi Hong Kong, Guang Dong, Fujian dan Taiwan, dan SIJORI-GT, yang meliputi Singapura, negara bagian Johor (Malaysia), dan Propinsi Riau (Indonesia), yang menjadi legenda pertumbuhan. Sementara itu, “Tumen River Delta” GT, Mekong River Delta GT, dan IMT GT di wilayah utara ASEAN telah berganti konsep dari tahapan ke tahapan konsep pertumbuhan yang konkret. Selanjutnya, bermunculan BIMP-EAGA (atau East ASEAN GT), West Asian GT yang melibatkan Iran dan Turkey, dan Indian Ocean GT yang melibatkan benua Afrika. Termasuk juga ‘Xinjian’ GT yang meliputi seluruh wilayah perbatasan Propinsi Xinjiang Cina.

Kerja sama *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) berdiri pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Langkawi, Malaysia, pada 20 Juli 1993. Visi pendirian Kerjasama IMT-GT untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara IMT-GT. Wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari kerja sama IMT-GT adalah Provinsi Nanggroe Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung. Kerjasama IMT-GT juga mencakup 14 Provinsi di Thailand, dan 8 negeri di Malaysia, yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mampu memajukan perekonomian bagi ketiga negara IMT-GT.

Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Thailand, mengambil peran aktif dalam IMT-GT dengan membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas. Melalui kerja sama IMT-GT, sektor swasta terus didorong menjadi “*engine of growth*”. Untuk tujuan tersebut, dibentuk suatu wadah bagi para pengusaha di kawasan IMT-GT yang disebut *Joint Business Council* (JBC). JBC secara aktif ikut dilibatkan dalam rangkaian *Senior Office Meeting* (SOM)/*Minister Meeting* (MM) IMT-GT setiap tahunnya (notulensi rapat IMT-GT Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015, 23 Mei 2011).

Pada pelaksanaannya, Propinsi Kepri mengalami tantangan dalam sektor Kelautan karena sektor ini merupakan bidang yang mengalami gesekan yang sangat kuat dalam dengan nelayan Thailand dan perlu diskusi bersama dengan Thailand untuk menemukan solusinya. Sementara itu Malaysia fokus pada peningkatan ekspor rumput lautnya yang .

Kerjasama IMT-GT antar tiga negara ini, sektor swasta bertindak sebagai lokomotif pendorongnya, namun peran serta pemerintah tidak dapat diabaikan, karena pemerintah berperan sebagai regulator dalam pelaksanaan kerjasama IMT-GT tersebut. IMT-GT JBC tidak hanya sebagai forum atau wahana pertemuan semata, akan tetapi IMT-GT JBC akan terus diupayakan sebagai wadah kerjasama *people to people/bussines to bussines* dimana sektor swasta diharapkan berinisiatif dan memegang kendali keberlangsungan proyek kerjasamanya. Inisiatif dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab sektor swasta yang terlibat dalam proyek tersebut. Namun, secara keseluruhan IMT-GT masih memerlukan dukungan dari pemerintah masing-masing negara anggota.

Masing-masing wilayah provinsi yang menjadi anggota forum kerjasama IMT-GT Indonesia, memiliki peluang untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ekonomi. Dalam konteks kerjasama ini, Provinsi Riau (satu dari 10 propinsi dari negara Indonesia) misalnya, berusaha untuk memanfaatkan forum ini seoptimal mungkin dengan cara mengkaji potensi-potensi yang dianggap berpeluang besar untuk memajukan daerah Riau. Diantara potensi-potensi tersebut yang dinilai cukup berperan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata, infrastruktur dan transportasi, perkebunan, Human Resource Development, dan perdagangan. Hingga saat ini, perkembangan *Working Group* (WG) yang tertuang dalam kerjasama IMT-GT menunjukkan setidaknya Provinsi Riau ikut terlibat di dalam WG *on Infrastructure and Transport*, WG *on Trade and Investment*, dan WG *on Tourism* (Wawancara dengan Andi Rahman, mantan Gubernur Riau, pada tanggal 1 Juni 2023).

Gambar 1: Wawancara dengan nara sumber:



Sumber: Dokumen Pribadi

Keikutsertaan Provinsi Riau pada IMT-GT dimulai tahun 1993 diawali dengan mengajukan beberapa proyek usulan diantaranya adalah pembangunan Terminal Agri Bisnis, Dumai sebagai IMT-GT Agri-Business Terminal, Riau Airline sebagai IMT-GT Airline, Balai Latihan Kerja Dumai sebagai Pusat Balai Latihan Kerja IMT-GT di Indonesia. Proyek pembangunan yang juga disulkan oleh Provinsi Riau adalah Pekanbaru – Dumai Toll Road Project. Universitas Riau sebagai Koordinator UNINET, WG HRD di Indonesia. Usulan lainnya adalah, Dumai – Melaka RORO Services Project. Pekanbaru – Melaka Power Interconnection Project. Terakhir, pengusulan Rumah Sakit (RS) Petala Bumi sebagai RS Pekerja Sumatera Promotion Center (SPC) sebagai IMT-GT Plaza. (Wawancara dengan Andi Rahman, mantan Gubernur Riau, pada tanggal 1 Juni 2023).

Hanya saja, dari sekian banyak proposal kerjasama yang diajukan Pemerintah Provinsi Riau dari sejak keikutsertaannya di IMT-GT, berdasarkan dokumen *Implementation Blueprint* 2012-2016 yang di-*release* oleh Bappeda Prov. Riau, baru terdapat 2 (dua) program/kegiatan yang sempat dilaksanakan, diantaranya: Ro-Ro Dumai – Melaka dan *Corridor Economic Zone* Melaka – Pekanbaru (jalan tol Pekanbaru – Dumai).

Potensi Propinsi Riau yang berhasil dikembangkan dalam kerja sama IMT-GT adalah pengembangan industri hilir CPO, produk hulu karet dan sagu. Pemanfaatan sumber daya alam lainnya untuk keperluan/pengembangan industry. Keragaman budaya dan keindahan alam sebagai daya tarik dibidang pariwisata. Kerja sama IMT-GT merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Provinsi Riau sendiri. Peluang yang dimiliki Provinsi ini antara lain karena letaknya yang strategis dalam hal lalu lintas perdagangan, pusat pertumbuhan ekonomi baru, sentra perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolah CPO. Sementara tantangan yang harus dihadapi adalah harus bekerja keras untuk mengoptimalkan produktivitas pembangunan ekonomi dan kesulitan untuk meningkatkan nilai tambah pada sector-sektor tertentu seperti pertanian dan perkebunan.

IMT-GT sebagai satu model GT, menunjukkan bahwa kerja sama GT dalam konteks wujud regionalisme baru lebih dari sekedar melintasi batasan-batasan nasional, GT memberi kebebasan aktivitas ekonomi yang memang sengaja diciptakan untuk saling menembus batasan-batasan yang ada dan secara alami bergabung dengan kehadiran hubungan komplementaritas yang mendukung. Pembentukan integrasi yang fleksibel ini berbeda dari integrasi ekonomi yang didasarkan pada aturan-aturan yang ketat melalui negosiasi-negosiasi yang biasanya memakan waktu yang lama sebagaimana model regionalisme lama. Hal ini mungkin menjadi karakteristik Asia dimana pola pembentukannya terjadi secara alami yang didalamnya melibatkan konsensus dan keragaman. Ragam GT ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi “Association of Asian GTs” yang bisa saja menjadi terintegrasi seperti kelompok-kelompok regional lainnya, yang kemudian berkembang menjadi sebuah liga ekonomi terbuka berskala global.

Kesimpulan

Kemunculan regionalisme baru mempercepat kerja sama ekonomi di Kawasan Asia dalam beberapa tahun terakhir dan memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi Asia sepanjang tahun 1990an. GT secara tipikal merupakan sekumpulan negara-negara yang ada di dalam satu region yang terlibat untuk mengeksploitasi aset-aset komplementaritas dalam kelompok. Pembangunan GT sebagai sebuah alat kerja sama yang memiliki ragam keuntungan bagi negara yang bergabung di dalamnya. GT memiliki lima elemen utama sebagai kunci kesuksesan yaitu komplementaritas ekonomi, keunggulan geografi, komitmen

kebijakan, koordinasi kebijakan dan pertumbuhan infrastruktur. Lima elemen diatas dipandang sebagai metakebijakan yang menempatkan GT sebuah tempat bagi investasi Kawasan yang dapat dijadikan strategi portabel dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada ekspor.

Daftar Pustaka

- Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia – ASEAN and the Problem of Regional Order*, (Routledge: New York).
- Acharya, A. (2006). *Europe and Asia: Reflections on a Tale of Two Regionalisms*, in: Fort, B. and Webber, D. (eds.), *Regional Integration in East Asia and Europe – Convergence or Divergence*, (Routledge: Oxon).
- Amin, A. and Thrift, N. (1994). *Globalization, Institutions and Regional Development in Europe* (Oxford: Oxford University Press).
- Breslin, S., Higgott, R. and Rosamond, B. (2002). *Regions in Comparative Perspective*, in: S. Breslin, C.W. Hughes, N. Phillips, B. Rosamond (eds.), *New Regionalisms in the Global Political Economy*, (Routledge: London).
- Castells, M. (1989). *Informational City* (Oxford: Blackwell).
- Fawcett, L. (2005). 'Regionalism from an Historical Perspective', in: Farrell, M., Hettne, B. and v. Langenhove, L. (eds.), *Global Politics of Regionalism – Theory and Practice*, (Pluto Press: London).
- Haas, E.B. (1975). *The Obsolescence of Regional Integration*, (Institute for International Studies: Berkley CA).
- Hettne, B. (1999). Globalization and the New Regionalism: The Second Great Transformation', in: Hettne, B., Sapir, A. and Sunkel, O. (eds.), *Globalism and the New Regionalism*, (St. Martin's Press: New York).
- Hettne, B. (2005). "Beyond the New Regionalism", in: *New Political Economy*, vol. 10, no. 4.
- Higgott, R. (2006). *The Theory and Practice of Region: The Changing Global Context*, in: Fort, B. and Webber, D. (eds.) *Regional Integration in East Asia and Europe*, (Routledge: Oxon).
- Hoffmann S. (1982). Reflections on the Nation-State in Western Europe Today, in *Journal of Common Market Studies*, vol. 21.
- Hurrell, A. (1995). Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics, in *Review of International Studies*, vol. 21.
- Hurrell, A. (2005). 'The Regional Dimension in International Relations Theory', in: Farrell, M., Hettne, B. and v. Langenhove, L. (eds.), *Global Politics of Regionalism – Theory and Practice*, (Pluto Press: London).
- Jessop, B. (2004). 'Multi-level Governance and Multi-level Metagovernance', in: Bache, I. and Flinders, M. (eds.) *Multi-level Governance* (Oxford University Press: Oxford).
- Lipietz, A. (1987). *Mirages and Miracles* (London: Zed).
- Milner, H.V. (1997). 'Industries, Governments, and Regional Trade Blocs', in: Mansfield, E.D. and Milner, H.V. (eds.), *The Political Economy of Regionalism*, (Columbia University Press: New York), pp. 77-106.
- Mitrany, D. (1994). 'A Working Peace System', in: Nelsen, B.F., Stubb, A. C-G. (eds.), *The European Union – Readings on Theory and Practice of European Integration*, (Lynne Rienner: London)
- Moravcsik, A. (1999). *The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht*, (UCL Press Limited: London).
- Oman, C. (1994). *Globalisation and Regionalisation: The Challenge for Developing Countries*, (OECD: Paris).
- Ohmae, K. (1993). The Rise of the Region State, in: *Foreign Affairs*, vol. 72.
- Schmitter, P.C. (2004). 'Neo-Neofunctionalism', in: Wiener, A., Diez, T. (eds.) *European Integration Theory*, (Oxford University Press: Oxford).
- Schulz, M., Söderbaum, F. and Öjendal, J. (2001). 'Introduction - A Framework for Understanding Regionalization', in: Schulz, M., Söderbaum, F. and Öjendal, J. (eds.), *Regionalization in a Globalizing World – A Comparative Perspective on Forms, Actors and Processes* (Zed Books: London).
- Warleigh-Lack, A. (2006). 'Towards a Conceptual Framework for Regionalisation: Bridging "New Regionalism" and "Integration Theory"', in: *Review of International Political Economy*, vol. 13, no. 5.
- Wallace, W. (1992). 'Introduction: The Dynamics of European Integration', in: W. Wallace (ed.), *The Dynamics of European Integration*, (Pinter Publishers: London).
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*, (Cambridge University Press: Cambridge).
- Wunderlich, Jens Uwe (2007), *Regionalism, Globalisation and International Order: Europe and Southeast Asia*. England: Ashgate Publishing Limited.